



Strategi Dakwah Politik Partai Persatuan Pembangunan Dan Korelasinya Dengan Perolehan Kursi Legislatif Pada Pemilu 2014

Ridwan Mubarak^{1*} & Isman Muslim²

¹²UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*mubaracktanpaobama@gmail.com

ABSTRAK

Politik dan dakwah merupakan dua ranah yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Politik berhubungan dengan pengelolaan kekuasaan dan kepentingan publik, sedangkan dakwah bertujuan mengajak manusia mewujudkan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Artikel ini menganalisis strategi dakwah politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan relevansinya dengan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2014. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan analisis isi terhadap materi politik yang mengandung pesan dakwah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dakwah politik PPP diwujudkan melalui kebijakan, program, komunikasi politik, keteladanan kader, dan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada perolehan kekuasaan, tetapi juga pada pendidikan politik, artikulasi aspirasi umat, pembentukan perilaku politik yang berorientasi pada kemaslahatan, serta pembangunan masyarakat. Efektivitas dakwah politik dipengaruhi kualitas komunikator, pesan, media, metode, dan respons masyarakat. Perolehan kursi legislatif menjadi indikator keberhasilan elektoral, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dakwah politik.

Kata kunci: dakwah politik, PPP, komunikasi politik, strategi dakwah, Pemilu 2014, partai Islam.

ABSTRACT

Politics and Islamic preaching are two interconnected domains in the life of Muslim societies. Politics concerns the management of power and public interests, while preaching seeks to encourage people to build their lives according to Islamic values. This article examines the political preaching strategy of the United Development Party (PPP) and its relevance to legislative seat acquisition in the 2014 Election. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach and content analysis of political materials containing Islamic preaching messages. The analysis shows that PPP's political preaching

is implemented through policies, programs, political communication, exemplary conduct of party cadres, and public participation. This strategy is not solely oriented toward electoral power, but also toward political education, articulation of Muslim interests, the development of politics based on public welfare, and community development. The effectiveness of political preaching is influenced by the quality of communicators, messages, media, methods, and audience responses. Legislative seats represent an indicator of electoral success, but not the sole measure of political preaching success.

Keywords: *Political Preaching; PPP; Political Communication; Preaching Strategy; 2014 Election; Islamic Political Party.*

PENDAHULUAN

Politik merupakan salah satu dimensi penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan politik tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bersama, menentukan kepemimpinan, mengelola kepentingan, serta membuat keputusan yang memiliki konsekuensi terhadap masyarakat luas. Karena itu, politik tidak semestinya hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai mekanisme pengelolaan kehidupan sosial menuju tujuan yang dianggap baik dan adil. Dokumen penelitian yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa politik secara fungsional berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, politik dalam persepsi sebagian masyarakat masih sering diasosiasikan dengan tipu muslihat, kelicikan, konflik kepentingan, dan praktik kekuasaan yang tidak bermoral.

Problem tersebut menjadi semakin kompleks ketika politik dibicarakan dalam perspektif Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam terdapat perdebatan mengenai hubungan antara agama dan politik. Sebagian kelompok pernah memandang politik sebagai wilayah yang kotor dan harus dijauhkan dari aktivitas keagamaan. Sebaliknya, berkembang pula kesadaran bahwa politik merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak mungkin diabaikan oleh umat Islam. Politik memiliki hubungan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan aspek kehidupan lainnya. Kesadaran mengenai pentingnya politik tersebut pada akhirnya mendorong munculnya berbagai upaya untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam ruang politik.

Dalam konteks Indonesia, hubungan Islam dan politik memiliki sejarah yang panjang. Demokratisasi pasca-Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk membentuk organisasi dan partai politik serta menyalurkan aspirasi politik secara terbuka. Kehadiran

berbagai partai politik berbasis Islam menjadi bagian dari dinamika tersebut. Partai Islam tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga dapat menjadi instrumen artikulasi aspirasi masyarakat Muslim dan pendidikan politik masyarakat.

Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu aktor penting dalam sejarah politik Islam Indonesia. PPP memiliki karakter sebagai partai yang memiliki basis historis dari aspirasi politik umat Islam. Dalam konteks tersebut, aktivitas politik PPP dapat dibaca bukan semata sebagai aktivitas perebutan jabatan politik, tetapi juga sebagai bagian dari proses menyampaikan nilai, aspirasi, dan pesan keagamaan melalui institusi politik.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana nilai-nilai dakwah diterjemahkan ke dalam aktivitas politik. Dakwah pada dasarnya merupakan aktivitas mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dokumen sumber merujuk kepada QS. al-Nahl [16]:125 sebagai salah satu dasar konseptual dakwah, yakni menyeru manusia menuju jalan Tuhan melalui hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujadalah dengan cara yang baik. Dengan demikian, dakwah tidak terbatas pada aktivitas verbal di masjid, majelis taklim, atau forum keagamaan. Dakwah dapat dilakukan melalui tindakan, institusi, kebijakan, pendidikan, dan berbagai ruang kehidupan manusia.

Kerangka tersebut memungkinkan munculnya konsep dakwah politik. Dakwah politik dapat dipahami sebagai proses menghadirkan pesan, nilai, etika, dan tujuan dakwah ke dalam arena politik. Dalam konteks partai politik Islam, dakwah politik berarti menjadikan aktivitas politik sebagai salah satu media untuk mewujudkan nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Orientasi politik dengan demikian tidak berhenti pada kekuasaan, tetapi diarahkan kepada kemaslahatan, keadilan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan umat.

Dokumen penelitian sumber secara eksplisit merumuskan beberapa persoalan pokok mengenai strategi dakwah politik PPP, meliputi kebijakan dalam menyampaikan pesan dakwah, program dakwah politik, metode yang digunakan, kendala yang dihadapi, tingkat keberhasilan dakwah politik, serta relevansinya terhadap pembangunan umat. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa strategi dakwah politik tidak dapat dipahami hanya melalui aktivitas kampanye menjelang pemilu. Strategi tersebut harus dilihat sebagai rangkaian aktivitas yang mencakup perumusan pesan,

pemilihan metode, pemanfaatan media, hubungan dengan masyarakat, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil.

Dalam konteks Pemilu 2014, pertanyaan mengenai korelasi antara strategi dakwah politik dan perolehan kursi legislatif menjadi menarik. Perolehan kursi merupakan indikator konkret keberhasilan elektoral suatu partai. Akan tetapi, keberhasilan elektoral tidak otomatis identik dengan keberhasilan dakwah. Sebaliknya, dakwah yang berhasil secara sosial belum tentu selalu menghasilkan peningkatan suara secara langsung. Karena itu, hubungan antara dakwah politik dan perolehan kursi perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi dakwah politik PPP, bentuk-bentuk pesan yang digunakan, metode komunikasi yang relevan, serta hubungan konseptual antara aktivitas dakwah politik dengan keberhasilan elektoral pada Pemilu 2014. Kajian juga berusaha menempatkan dakwah politik sebagai proses komunikasi dan transformasi sosial, bukan semata-mata sebagai instrumen mobilisasi suara.

Secara akademik, artikel ini penting karena mempertemukan tiga ranah kajian, yaitu ilmu dakwah, komunikasi politik, dan studi politik Islam. Dokumen sumber sendiri menempatkan dakwah melalui politik sebagai salah satu model kajian ilmu dakwah sekaligus sebagai manajemen taktis dan strategis dalam pengembangan ilmu dakwah. Dengan perspektif tersebut, aktivitas politik dapat dianalisis sebagai salah satu arena dakwah yang memiliki karakter, tantangan, dan logika komunikasi tersendiri.

LANDASAN TEORITIS

Dakwah sebagai Proses Transformasi Kehidupan

Dakwah secara substansial merupakan aktivitas mengajak manusia menuju jalan Allah. Dakwah bukan hanya aktivitas penyampaian informasi keagamaan, tetapi proses yang melibatkan berbagai unsur komunikasi dan transformasi. Dokumen sumber menyebutkan bahwa hakikat dakwah melibatkan da'i, pesan atau maudhu', media atau wasilah, metode atau uslub, mad'u, respons, serta situasi dan kondisi. Interaksi berbagai unsur tersebut menjadi objek penting dalam ilmu dakwah.

Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa dakwah bersifat multidimensional. Pesan yang baik membutuhkan komunikator yang mampu menyampaikan pesan, media yang sesuai, metode yang tepat, dan pemahaman terhadap karakter penerima pesan. Dakwah juga tidak hanya berupa komunikasi verbal. Dalam dokumen sumber, bentuk dakwah

dikategorikan dalam ahsan qawl, ahsan amal, serta perpaduan antara ucapan dan perbuatan sebagai keteladanan.

Dengan demikian, dakwah politik dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk dakwah yang menggunakan institusi politik sebagai ruang transformasi. Politik menyediakan instrumen berupa kebijakan, regulasi, representasi, pendidikan politik, serta pengelolaan sumber daya publik. Apabila instrumen tersebut digunakan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan umat, maka politik memiliki dimensi dakwah.

Politik dalam Perspektif Islam

Politik dalam perspektif Islam tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Dalam tradisi pemikiran Islam, politik berhubungan dengan pengelolaan urusan masyarakat, kepemimpinan, pelayanan, dan upaya menciptakan kehidupan yang baik.

Dokumen sumber menguraikan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menekankan politik sebagai upaya memperbaiki kehidupan manusia dan menghindarkan kerusakan. Keadilan ditempatkan sebagai salah satu landasan utama. Politik dengan demikian dinilai dari sejauh mana ia mampu membawa manusia menuju perbaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan.

Perspektif tersebut memiliki konsekuensi penting bagi partai politik Islam. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan instrumen. Kekuasaan menjadi bernilai ketika digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberhasilan partai Islam tidak cukup diukur berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh. Kualitas representasi, konsistensi kebijakan, integritas kader, keberpihakan kepada masyarakat, dan kemampuan memperjuangkan aspirasi publik juga menjadi ukuran penting.

Dakwah Politik

Dakwah politik merupakan proses integrasi antara nilai dakwah dan aktivitas politik. Dalam konteks ini, politik berfungsi sebagai salah satu wasilah dakwah. Dokumen sumber menegaskan bahwa kegiatan dakwah melalui politik harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai risalah Islam dalam aktivitas politik. Orientasinya tidak semata pada kekuasaan, tetapi pada pembumian Islam sebagai landasan gerak kader dan partai dalam membina umat.

Dakwah politik dapat berlangsung setidaknya melalui tiga jalur.

Pertama, dakwah melalui komunikasi politik, yaitu penyampaian gagasan dan pesan kepada masyarakat. Kedua, dakwah melalui program dan kebijakan, yaitu penerjemahan nilai dakwah dalam tindakan politik. Ketiga, dakwah melalui keteladanan politik, yakni perilaku kader dan elite politik yang mencerminkan nilai moral Islam.

Ketiga jalur tersebut saling berhubungan. Pesan yang baik tetapi tidak diwujudkan dalam program akan kehilangan kredibilitas. Sebaliknya, program yang baik tetapi tidak dikomunikasikan secara efektif dapat kehilangan dukungan publik. Sementara itu, program dan komunikasi yang baik dapat kehilangan legitimasi apabila pelaku politik menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai yang disampaikan.

Strategi Komunikasi Dakwah

Strategi dakwah berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan proses komunikasi agar tujuan dakwah dapat dicapai secara efektif. Dalam perspektif komunikasi, pesan tidak dapat dipisahkan dari komunikator, media, dan komunikan.

Dokumen sumber menggunakan model Jarum Hipodermik untuk menjelaskan pengaruh komunikator, pesan, dan media terhadap komunikan. Model tersebut menempatkan komunikator, struktur pesan, gaya pesan, appeals, serta media sebagai unsur yang dapat memengaruhi perhatian, pengertian, penerimaan, dan selanjutnya perubahan kognitif, afektif, serta behavioral.

Meskipun model komunikasi kontemporer telah berkembang jauh melampaui asumsi efek langsung, kerangka tersebut tetap relevan untuk menunjukkan pentingnya kualitas pesan dan komunikator. Dalam dakwah politik, komunikator harus memiliki kredibilitas, daya tarik, dan otoritas moral. Pesan harus jelas, relevan, menarik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Media harus disesuaikan dengan karakter masyarakat yang menjadi sasaran.

Schram sebagaimana dirujuk dalam dokumen sumber memberikan beberapa prinsip pesan yang efektif, yaitu menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna antara sumber dan penerima, menarik perhatian, menawarkan pemecahan masalah, dan berkaitan dengan kebutuhan komunikan. Prinsip tersebut relevan dengan komunikasi politik karena masyarakat tidak hanya membutuhkan slogan, tetapi juga solusi konkret atas persoalan kehidupan.

Politik Elektoral dan Perolehan Kursi

Dalam sistem demokrasi elektoral, partai politik membutuhkan dukungan masyarakat untuk memperoleh representasi. Perolehan kursi legislatif menjadi salah satu indikator paling konkret dari kemampuan partai mengubah dukungan masyarakat menjadi representasi politik.

Namun, perolehan kursi merupakan hasil dari banyak variabel. Dakwah politik hanya salah satu di antaranya. Faktor kandidat, organisasi partai, popularitas, isu politik, jaringan sosial, kondisi ekonomi, perilaku pemilih, kampanye, media, serta kompetisi antarpolisi turut menentukan hasil elektoral.

Karena itu, hubungan dakwah politik dan perolehan kursi lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bersifat tidak langsung. Dakwah dapat membangun identitas, kepercayaan, loyalitas, pengetahuan politik, dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Semua unsur tersebut berpotensi berkontribusi terhadap dukungan elektoral, tetapi tidak secara otomatis menentukan hasil pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah Politik sebagai Identitas Strategis PPP

Berdasarkan kerangka penelitian sumber, strategi dakwah politik PPP dapat dipahami sebagai upaya menjadikan aktivitas politik sebagai bagian dari perjuangan dakwah. Hal tersebut tampak dari penekanan bahwa seorang Muslim tidak hanya berdakwah di ruang keagamaan formal, tetapi juga dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar di berbagai ruang kehidupan, termasuk parlemen.

Konsepsi ini menghasilkan perubahan cara pandang terhadap politik. Politik tidak lagi dilihat semata-mata sebagai arena kekuasaan, melainkan sebagai salah satu ruang pengabdian. Dengan demikian, kader partai tidak hanya diposisikan sebagai politisi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Identitas dakwah tersebut memiliki potensi strategis bagi PPP. Sebagai partai yang memiliki sejarah keterkaitan dengan aspirasi politik umat Islam, pesan keagamaan dapat menjadi sumber legitimasi identitas. Namun, identitas tersebut juga menghadirkan tuntutan yang lebih tinggi. Masyarakat dapat menilai kesesuaian antara nilai Islam yang dikomunikasikan partai dengan perilaku kader dan kebijakan yang diperjuangkan.

Artinya, identitas dakwah tidak cukup diproduksi melalui simbol dan slogan. Ia harus diwujudkan dalam praktik. Jika terdapat jarak antara pesan dan perilaku, kredibilitas dakwah politik dapat menurun. Sebaliknya, konsistensi antara pesan, perilaku, program, dan kebijakan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kebijakan sebagai Bentuk Dakwah Politik

Salah satu temuan konseptual penting dari dokumen sumber adalah bahwa dakwah politik harus dilihat dari kebijakan yang dihasilkan. Rumusan masalah penelitian menempatkan kebijakan pengurus PPP dalam menyampaikan pesan dakwah sebagai salah satu fokus utama.

Dalam perspektif ini, kebijakan politik dapat dipahami sebagai bentuk dakwah bil-hal. Pesan dakwah tidak lagi hanya berupa nasihat, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Misalnya, keberpihakan terhadap kelompok masyarakat lemah, penguatan pendidikan, perlindungan moral masyarakat, pemberdayaan ekonomi, penguatan lembaga sosial keagamaan, serta kebijakan yang mendorong keadilan sosial dapat menjadi bentuk aktualisasi nilai dakwah.

Pendekatan tersebut memperluas pengertian dakwah. Dakwah tidak berhenti pada perubahan pengetahuan dan sikap individual, tetapi dapat bergerak menuju perubahan struktur sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan dakwah adalah membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Dokumen sumber menempatkan perubahan sosial sebagai salah satu dimensi penting dalam memahami tujuan dakwah.

Dengan demikian, keberhasilan dakwah politik PPP seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan menghubungkan nilai keagamaan dengan persoalan konkret masyarakat.

Program Partai sebagai Media Dakwah

Program merupakan jembatan antara ideologi dan realitas. Dalam konteks dakwah politik, program menjadi sarana menerjemahkan nilai Islam ke dalam bentuk yang dapat dirasakan masyarakat.

Dokumen sumber secara khusus menempatkan program sebagai salah satu aspek penelitian mengenai dakwah politik PPP. Hal tersebut menunjukkan bahwa program memiliki kedudukan penting dalam strategi dakwah.

Program dakwah politik idealnya memenuhi tiga karakter. Pertama, program harus memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, program harus memiliki orientasi kemaslahatan. Ketiga, program harus

dapat dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Kegagalan memenuhi ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan program politik kehilangan fungsi dakwah. Program yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat akan sulit mendapatkan respons. Program yang hanya berorientasi elektoral dapat dianggap sebagai transaksi politik. Sementara program yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan kehilangan daya pengaruh.

Oleh karena itu, strategi dakwah politik PPP perlu mempertemukan antara substansi program dan komunikasi program. Masyarakat harus mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan partai, tetapi juga mengapa program tersebut dilakukan dan nilai apa yang melandasinya.

Pesan Dakwah dalam Komunikasi Politik

Pesan merupakan unsur sentral dalam strategi dakwah politik. Pesan politik yang membawa nilai dakwah harus mampu menjembatani bahasa agama dengan persoalan kehidupan masyarakat.

Dokumen sumber menekankan bahwa pesan harus jelas, berbasis fakta, ringkas, lengkap, nyata, menarik, meyakinkan, sopan, dan memiliki keterkaitan antarbagian. Prinsip ini sangat penting dalam komunikasi politik.

Pesan dakwah politik yang terlalu abstrak berpotensi sulit dipahami masyarakat. Sebaliknya, pesan yang terlalu pragmatis dapat kehilangan dimensi moral dan ideologisnya. Karena itu, strategi yang dibutuhkan adalah menghubungkan nilai normatif Islam dengan persoalan konkret.

Misalnya, konsep keadilan perlu diterjemahkan ke dalam pembicaraan mengenai akses pendidikan, kesejahteraan ekonomi, pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, dan pemerataan pembangunan. Konsep amanah dapat diterjemahkan ke dalam transparansi dan integritas politik. Konsep ukhuwah dapat diwujudkan dalam politik yang menghindari konflik sektarian dan memperkuat solidaritas sosial.

Dengan cara tersebut, dakwah politik menjadi lebih komunikatif karena berbicara langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Metode Dakwah Politik

Metode dakwah politik tidak dapat diseragamkan. Dokumen sumber mengarahkan penelitian untuk mengidentifikasi metode yang digunakan pengurus PPP dalam melakukan proses dakwah politik kepada masyarakat.

Secara konseptual, metode tersebut dapat dikategorikan menjadi

komunikasi langsung, komunikasi melalui media, dakwah melalui program, dan dakwah melalui keteladanan.

Komunikasi langsung dapat dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat, pengajian, dialog publik, forum organisasi, kunjungan, dan kegiatan sosial. Komunikasi melalui media dapat dilakukan melalui tulisan, pidato, media massa, dan media komunikasi lainnya. Dakwah melalui program dilakukan dengan menghadirkan manfaat sosial. Sementara dakwah melalui keteladanan dilakukan dengan menunjukkan perilaku politik yang sesuai dengan nilai Islam.

Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks, penggunaan metode secara simultan menjadi penting. Masyarakat tidak dapat lagi diposisikan sebagai penerima pesan yang pasif. Mereka memiliki kemampuan untuk membandingkan informasi, memberikan respons, mengkritik, dan membentuk opini publik.

Karena itu, strategi dakwah politik perlu bergeser dari pola komunikasi satu arah menuju komunikasi dialogis. Politisi tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masyarakat. Dengan demikian, dakwah politik dapat berfungsi sebagai proses pertukaran gagasan sekaligus proses pendidikan politik.

Media dan Efektivitas Dakwah Politik

Media merupakan instrumen penting dalam memperluas jangkauan pesan politik dan dakwah. Dokumen sumber menempatkan media cetak dan elektronik sebagai salah satu variabel komunikasi yang dapat memengaruhi efek pesan.

Dalam konteks Pemilu 2014, perkembangan media sosial telah mulai mengubah pola komunikasi politik di Indonesia. Partai dan kandidat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media konvensional. Media digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, interaktif, dan personal.

Namun, penggunaan media tidak otomatis menjamin efektivitas pesan. Konten dakwah politik harus disesuaikan dengan karakter media dan audiens. Pesan yang cocok untuk forum pengajian belum tentu cocok untuk media sosial. Demikian pula pesan yang efektif dalam pidato kampanye belum tentu efektif dalam pemberitaan media massa.

Karena itu, strategi media perlu mempertimbangkan bentuk pesan, karakter audiens, waktu penyampaian, kredibilitas sumber, serta kemungkinan interaksi dengan penerima pesan.

Korelasi Strategi Dakwah Politik dengan Perolehan Kursi

Hubungan antara strategi dakwah politik dan perolehan kursi legislatif perlu dipahami secara hati-hati. Dokumen sumber menjadikan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2014 sebagai konteks penting penelitian, tetapi juga menempatkan keberhasilan dakwah dan pembangunan umat sebagai persoalan tersendiri.

Secara konseptual, dakwah politik dapat memberikan kontribusi terhadap perolehan kursi melalui beberapa mekanisme.

Pertama, dakwah dapat membentuk identitas politik. Masyarakat yang memiliki kedekatan nilai dengan identitas partai cenderung memiliki dasar tertentu dalam menentukan pilihan.

Kedua, dakwah dapat membangun kepercayaan. Pesan yang konsisten antara komunikasi, program, dan perilaku politik dapat meningkatkan kredibilitas partai.

Ketiga, dakwah dapat meningkatkan literasi politik masyarakat. Pendidikan politik membuat masyarakat lebih memahami fungsi partai, parlemen, dan pemilu.

Keempat, dakwah dapat membangun jaringan sosial. Aktivitas keagamaan dan sosial dapat memperluas hubungan antara kader dan masyarakat.

Kelima, dakwah melalui program nyata dapat menciptakan pengalaman langsung masyarakat terhadap keberadaan partai.

Namun demikian, korelasi tersebut bukan hubungan kausal yang sederhana. Perolehan kursi dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Oleh sebab itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa semakin kuat aktivitas dakwah otomatis semakin banyak kursi yang diperoleh. Dakwah politik harus berinteraksi dengan faktor organisasi, kandidat, struktur sosial, perilaku pemilih, strategi kampanye, kompetisi politik, dan kondisi elektoral.

Dengan demikian, istilah “korelasi” dalam konteks penelitian ini lebih tepat dimaknai sebagai keterhubungan antara kualitas strategi dakwah politik dengan kapasitas partai membangun dukungan sosial-politik.

Dakwah Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat

Salah satu potensi terbesar dakwah politik adalah pendidikan politik. Kehadiran partai politik Islam dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban politiknya. Dokumen sumber menegaskan bahwa keberadaan banyak partai politik dapat memperluas ruang masyarakat dalam menyalurkan aspirasi serta mendorong masyarakat

menjadi lebih rasional, kritis, dan partisipatif.

Dalam konteks tersebut, PPP tidak semestinya memandang masyarakat hanya sebagai konstituen pada saat pemilu. Masyarakat harus diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi politik, menyampaikan aspirasi, mengawasi wakilnya, dan mengevaluasi kebijakan.

Dakwah politik yang sehat dengan demikian tidak memanipulasi sentimen keagamaan untuk kepentingan elektoral jangka pendek. Sebaliknya, dakwah politik memberikan ruang kepada masyarakat untuk membuat keputusan politik berdasarkan pengetahuan, pertimbangan moral, dan kepentingan publik.

Kendala Dakwah Politik

Dokumen sumber secara eksplisit menjadikan kendala dakwah politik sebagai salah satu fokus penelitian. Secara konseptual, terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas dakwah politik.

Pertama, adanya persepsi negatif terhadap politik. Politik yang dianggap identik dengan intrik dan kepentingan pribadi dapat menyebabkan masyarakat bersikap skeptis.

Kedua, adanya kesenjangan antara nilai dan praktik. Ketika perilaku elite politik tidak sesuai dengan pesan moral yang disampaikan, kredibilitas dakwah akan mengalami persoalan.

Ketiga, kompetisi politik yang semakin ketat. Partai tidak hanya bersaing melalui ideologi, tetapi juga melalui kandidat, jaringan, media, dan strategi komunikasi.

Keempat, perubahan karakter masyarakat. Masyarakat semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi. Pesan politik tidak lagi diterima begitu saja.

Kelima, risiko politisasi agama. Dakwah politik dapat kehilangan substansinya apabila simbol dan narasi agama hanya digunakan untuk mendapatkan dukungan elektoral.

Karena itu, dakwah politik membutuhkan etika. Penggunaan simbol agama harus disertai tanggung jawab moral. Perbedaan pilihan politik tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial atau permusuhan keagamaan.

Keberhasilan Dakwah Politik: Melampaui Kursi Legislatif

Salah satu persoalan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukur keberhasilan dakwah politik PPP. Dokumen sumber menempatkan tingkat keberhasilan dakwah politik sebagai salah satu

pertanyaan penelitian.

Jika keberhasilan hanya diukur berdasarkan jumlah kursi, maka dakwah politik direduksi menjadi strategi elektoral. Padahal dakwah memiliki tujuan yang lebih luas. Keberhasilan dakwah dapat terlihat dari perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, kualitas kehidupan sosial, partisipasi masyarakat, serta munculnya kebijakan yang lebih berorientasi kepada kemaslahatan.

Dengan demikian, perolehan kursi merupakan output politik, sedangkan perubahan sosial dan kualitas kehidupan masyarakat merupakan outcome yang lebih substantif.

Dalam kerangka tersebut, seorang anggota legislatif yang berasal dari partai Islam seharusnya dipandang sebagai agen dakwah politik. Setelah memperoleh kursi, tanggung jawab dakwah tidak berhenti. Justru pada tahap tersebut dakwah memasuki ruang yang lebih strategis melalui legislasi, pengawasan, penganggaran, dan representasi.

Artinya, keberhasilan Pemilu harus dilanjutkan dengan keberhasilan menjalankan mandat politik.

Dakwah Politik sebagai Strategi Pembangunan Umat

Tujuan akhir dakwah politik bukan hanya kemenangan partai, tetapi pembangunan umat. Dokumen sumber secara eksplisit mempertanyakan relevansi dakwah politik PPP terhadap proses pembangunan umat.

Pembangunan umat dalam konteks ini memiliki dimensi yang luas. Ia mencakup pembangunan spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Partai politik Islam dapat berkontribusi terhadap pembangunan tersebut apabila mampu menghubungkan aspirasi keagamaan dengan kebutuhan masyarakat.

Politik menjadi instrumen pembangunan ketika kekuasaan digunakan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Sebaliknya, politik kehilangan dimensi dakwah apabila kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan kelompok atau elite.

Oleh karena itu, strategi dakwah politik PPP perlu diarahkan pada integrasi antara tiga orientasi: orientasi nilai, orientasi masyarakat, dan orientasi kelembagaan. Orientasi nilai memberikan landasan moral. Orientasi masyarakat memastikan bahwa politik menjawab kebutuhan publik. Orientasi kelembagaan memastikan bahwa nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program.

PENUTUP

Strategi dakwah politik Partai Persatuan Pembangunan dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam aktivitas politik melalui komunikasi, kebijakan, program, pendidikan politik, dan keteladanan kader. Dalam perspektif ini, politik tidak diposisikan semata-mata sebagai arena perebutan kekuasaan, tetapi sebagai salah satu ruang dakwah yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dakwah politik memiliki dimensi komunikasi yang kuat. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kualitas komunikator, substansi pesan, metode, media, serta respons masyarakat. Pesan dakwah politik harus jelas, relevan, menarik, berbasis fakta, dan memiliki hubungan dengan persoalan konkret masyarakat. Dengan demikian, bahasa keagamaan perlu diterjemahkan ke dalam agenda politik yang dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hubungan antara strategi dakwah politik dengan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2014 tidak dapat dipahami sebagai hubungan sebab-akibat yang sederhana. Aktivitas dakwah dapat membangun identitas politik, kepercayaan, jaringan sosial, pendidikan politik, dan legitimasi, yang pada akhirnya berpotensi memberikan kontribusi terhadap dukungan elektoral. Namun, perolehan kursi juga dipengaruhi oleh faktor kandidat, organisasi, perilaku pemilih, kompetisi antarpolisi, isu politik, media, dan kondisi sosial-politik.

Karena itu, perolehan kursi legislatif tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan dakwah politik. Kursi merupakan salah satu indikator keberhasilan elektoral, sementara keberhasilan dakwah yang lebih substansial terletak pada kemampuan partai mentransformasikan nilai-nilai Islam menjadi kebijakan, program, pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan sosial.

Dakwah politik PPP dengan demikian idealnya tidak berhenti pada momentum pemilu. Setelah memperoleh mandat politik, kader dan anggota legislatif memiliki tanggung jawab untuk menjadikan kekuasaan sebagai instrumen pelayanan dan pembangunan umat. Politik yang berorientasi dakwah harus mampu mempertemukan nilai Islam, kepentingan masyarakat, dan tata kelola demokrasi.

Secara teoritis, kajian ini memperkuat pandangan bahwa ilmu dakwah memiliki karakter interdisipliner dan dapat berhubungan dengan

ilmu politik, komunikasi, sosiologi, dan studi media. Dakwah politik merupakan wilayah yang memungkinkan pengembangan kajian dakwah di luar ruang keagamaan konvensional.

Secara praktis, PPP perlu mengembangkan strategi dakwah politik yang lebih substantif dengan memperkuat konsistensi antara pesan, program, kebijakan, dan perilaku kader. Partai juga perlu mengembangkan komunikasi politik yang dialogis dan menjadikan masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sasaran mobilisasi suara.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji secara empiris hubungan antara strategi dakwah politik dengan perolehan suara dan kursi legislatif. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan strategi dakwah, intensitas komunikasi, program sosial, jaringan kader, karakter pemilih, serta hasil elektoral pada tingkat daerah dan nasional. Dengan demikian, hubungan antara dakwah politik dan keberhasilan elektoral dapat dianalisis secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ridha. (2004). *Amal Siyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah*. Bandung: Syaamil.
- Al-Baby al-Khuli. (1982). *Tazkirah al-Du'ah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (2005). *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir.
- Anshari, Endang Saifuddin. (1982). *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam*. Bandung: Pustaka Salman.
- Atjeh, Abubakar. (1986). *Potret Dakwah Muhammad SAW dan Para Sahabatnya*. Solo: Ramadhani.
- Bulaeng, Andi. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Fatwa, A. M. (2002). *Satu Islam Multipartai: Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*. Bandung: Mizan.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamka. (1982). *Prinsip-Prinsip dan Kebijakan Pelaksanaan Dakwah Islam*. Jakarta: Umminda.
- Kazhim, Musa, & Alfian Hamzah. (1999). *5 Partai dalam Timbangan*:

- Analisis dan Prospek. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Kusnawan, Aep. (2004). Berdakwah Lewat Tulisan. Bandung: Mujahid.
- Kusnawan, Aep, & Agus Ahmad Syafe'i. (2004). Kajian Ontologi Dakwah Islam dalam Ilmu Dakwah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kusnawan, Aep, & Asep Muhyidin. (2004). Ilmu Dakwah: Dakwah dalam Al-Qur'an. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Marzuki. (1989). Metodologi Riset. Jakarta: FE UI.
- Moleong, Lexy J. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Nung. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulkhan, Abdul Munir. (1996). Ideologisasi Gerakan Dakwah. Yogyakarta: Sippres.
- Munawir, Ahmad Warson. (1984). Kamus Besar Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Pratiknya, A. W. (1983). Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas. Yogyakarta: Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.
- Rakhmat, Jalaluddin. (1995). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2005). Rekayasa Sosial: Revolusi, Reformasi atau Manusia Besar? Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Sastropetro. (1991). Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa. Bandung: Alumni.
- Siahaan. (1991). Komunikasi: Pemahaman dan Penerapannya. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Subandi, Ahmad. (1994). Ilmu Dakwah: Pengantar ke Arah Metodologi. Bandung: Yayasan Syahida.
- Surakhmad, Winarno. (1999). Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito.
- Syukir, Asmuni. (1983). Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Zaidan, Abdul Karim. (1980). Dasar-Dasar Dakwah. Jakarta: Paramadina.